



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/9451/2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN  
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK  
KOMPUTER DAN JARINGAN

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM DIPONEGORO LOSARI  
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari dari Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Losari Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian dan Operasional Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KP/2016 Tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
  2. Surat Permohonan dari SMK Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 05/YWID/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017 Hal Permohonan Izin Oprasional SMK Islam Diponegoro Losari;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/09347 tanggal 25 September 2017 Perihal : Rekomendasi.

#### M E M U T U S K A N

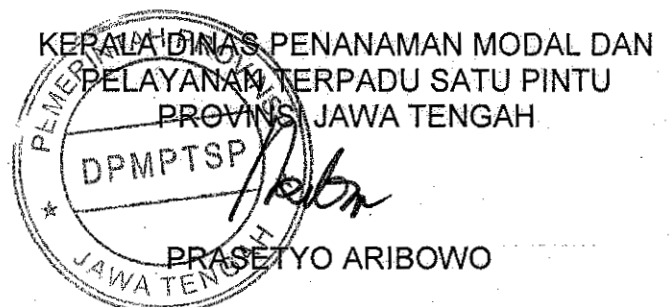
- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- |              |  |
|--------------|--|
| Nama Sekolah | : SMK ISLAM DIPONEGORO LOSARI                  |
| Nama Yayasan | : Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Losari Brebes |

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 34, Kecamatan  
Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa  
Tengah  
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika  
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan  
Nilai Investasi : Rp. 11.935.000.000,-

- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari; di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan menengah, Kepala SMK yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- KELIMA : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Diponegoro Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 27 September 2017



**TEMBUSAN :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah VI Pekalongan.